

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era reformasi saat ini, akuntansi sektor publik di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah. Salah satu permasalahan utama yang masih sering dijumpai adalah belum optimalnya penyajian informasi keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami oleh publik maupun pemangku kepentingan lainnya. Keterbatasan kapasitas dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, rendahnya kualitas data keuangan, serta belum meratanya pemahaman terhadap prinsip akuntansi pemerintahan menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi fiskal yang diharapkan.

Untuk mewujudkan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan pada pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2015 (Hakiki 2020).

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerbitkan Peraturan Walikota mengenai kebijakan akuntansi berupa SAP. Dengan adanya peraturan tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe berupaya menyusun laporan keuangan yang mengikuti peraturan walikota tersebut dengan menerapkan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa SAP dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kota Lhokseumawe yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, dan yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Menurut Husain & Mukrima, (2025) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan instansi dalam mengelola keuangan.

Pemerintah daerah dan SKPD sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini mengharuskan adanya penyesuaian dari sistem akuntansi berbasis kas menuju ke sistem akuntansi berbasis akrual Namun, dalam pelaksanaannya, SKPD Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, menurut Sari, (2022) penerapan akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti & Wulandari, (2024) juga menyatakan bahwa SDM yang belum familiar dengan konsep akrual menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum maksimal, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Kedua, meskipun sistem informasi akuntansi, seperti aplikasi SIMDA, telah diterapkan di SKPD Kota Lhokseumawe, kendala teknis dan kurangnya pelatihan bagi pengguna membuat pemanfaatan

sistem ini belum maksimal (Kewas et al., 2019). Hal ini menyebabkan data keuangan sering terlambat diolah dan kurang akurat, sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Ketiga, komunikasi dan koordinasi internal di SKPD juga masih perlu ditingkatkan agar proses pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kurangnya sinergi antar bagian menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan (Diah, 2020). Hasil audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2016 yang mana opini diperoleh dari BPK menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2015, LKPD Kota Lhokseumawe mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan opini WDP, tetapi Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil meningkatkan opini WTP pada tahun 2017-2019.

Walaupun penurunan opini audit tersebut tidak terlalu signifikan, namun keadaan tersebut berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang tidak stabil atau menurun di tahun 2016. Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah di Indonesia melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa SAP yang bertujuan untuk memberikan pedoman utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ikhyanuddin et al., 2022).

SAP yang digunakan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah SAP edisi terbaru yaitu SAP 2021. Untuk memperkuat kebijakan terkait SAP, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual. Untuk mendukung beberapa perubahan dalam

standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013, tentang Penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah yang menjadi pedoman untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Lasabuda et al., 2020).

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja keuangan pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah perlu sistem pengendalian intern pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan SKPD. Program kinerja pada instansi pemerintah sangat tergantung pada hasil pembenahan yang dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukan bahwa kualitas pengendalian intern suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Sementara kualitas pengendalian intern yang buruk akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun, yang terjadi pada Kota Lhokseumawe yaitu di tahun 2020 pemerintah kota (PEMKO) Lhokseumawe Kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mana penghargaan ini telah diperoleh empat tahun berturut-turut dari tahun 2017-2020. Meskipun badan pemeriksaan keuangan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk pemerintah kota Lhokseumawe, namun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu

1. Terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah

2. Pengadaan belanja modal lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda Meuraksa tidak sesuai ketentuan
3. Hak tagih piutang bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan belum divalidasi
4. Pengelolaan asset tetap pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya memadai
5. Pengendalian kewajibabn kurang optimal dan membebani keuangan daerah (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tanggal 26 April 2021).

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang terkomputerisasi yang berperan untuk menyiapkan informasi finansial dan juga informasi yang diperoleh dalam bentuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan transaksi dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. System informasi akuntansi berperan penting bagi perusahaan dalam hal efektivitas perencanaan, pengendalian, analisa, pengambilan keputusan, dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa system informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk efektivitas kinerja keuangan serta kinerja manajemen yang pada akhirnya akan menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Oleh karena itu sistem informasi akuntansi harus dirancang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Sistem informasi yang baik tidak hanya digunakan untuk menyimpan data secara elektronik tetapi juga harus mampu mendukung proses analisis yang dilakukan oleh manajemen salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi

akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.

Hal ini menjelaskan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang menjelaskan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Saputri et al., 2023). Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut.

Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Assyafa, 2021).

Kualitas laporan keuangan di pengaruhi oleh akuntansi akrual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fibriani & Deviani, (2025) Akuntansi akrual menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal karena mencatat semua transaksi, dan peristiwa ekonomi termasuk yang belum terjadi. Standar akuntansi nasional mengalami tiga fase perkembangan yang berbeda seiring berjalannya waktu. Standar akuntansi nasional mengalami tiga fase perkembangan yang berbeda

seiring berjalannya waktu SAP yang di tetapkan pada tahun 2003 disadarkan pada kas dari tahun 2004 hingga 2014 stadar akutansi pemerintah mengalami transisi dari akutansi kas menjadi akutansi akrual.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, secara resmi beralih menggunakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini memberikan kerangka yang jelas dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan komponen laporan keuangan sehingga meningkatkan relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat secara signifikan seiring dengan implementasi SAP berbasis akrual.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe?
3. Apakah akuntansi berbasis akrual dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui apakah akuntansi berbasis akrual dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa masukan dan rekomendasi kepada SKPD Kota Lhokseumawe mengenai pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual dan sistem informasi akuntansi secara optimal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan SKPD dapat memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pihak manajemen SKPD dalam mengidentifikasi kendala serta mencari solusi untuk

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah semakin baik.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta memperkuat teori-teori yang membahas hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di sektor publik.